

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis korelasi berganda sebagaimana yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2017-2020, menunjukkan bahwa untuk tahun 2017-2020 besarnya persentase PAD yang terealisasi berturut-turut adalah 120,08%, 64,20%, 81,73%, dan 66,34%. Data di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi tertinggi dan paling memuaskan adalah di tahun 2017 yaitu sebesar 120,08%. Sementara persentase realisasi yang paling rendah adalah tahun 2018 yaitu 64,20%.
2. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2017-2020, menunjukkan bahwa untuk tahun 2017-2020 besarnya persentase Belanja Langsung yang terealisasi berturut-turut adalah 86,38%, 88,1%, 89,04%, dan 75,48%. Data di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi tertinggi dan paling memuaskan adalah di tahun 2019 yaitu 89,04%

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih harus ditingkatkan lagi terutama untuk penerimaan PAD. Tujuan utamanya adalah untuk perbaikan kondisi keuangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

5.2. IMPLIKASI TEORITIS

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Halim (2008) menjelaskan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto, 2011). Menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut.

Menurut Bastian (2006: 267) dalam Fifat dan Nadirsyah (2016: 3) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian untuk sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap

APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung pada kegiatan dan program pemerintah.

5.3. IMPLIKASI TERAPAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Saran yang dapat direkomendasikan adalah Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dan tidak hanya berfokus kepada variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung saja, tetapi juga meneliti variabel lainnya, seperti kemampuan kerja, penggunaan teknologi dan peran audit.